



Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Serumpun Pauh Kabupaten Kerinci

Emilya Gusmita

STIA NUSA Sungai Penuh

Email: emillyaa2000@gmail.com

Abstract

Development is a business or a series of growth and change efforts that are planned in a better direction. While the purpose of development is to be able to realize a just, prosperous and prosperous society both materially and spiritually. In the implementation of the development so that it is in accordance with the objectives that have been set. Independent village development can result from the good performance of government organizations, so that it will produce effective and quality village development. This study analyzes the performance of village officials in administering village governance in Serumpun Pauh, Kerinci district. The research method used is a qualitative research method in which the researcher directly observes the object to be studied by conducting an in-depth study and analysis of the data found in the field which will be outlined in descriptive writing. The results of this study The results of this study indicate that the Analysis of the Performance of Village Apparatuses in the Implementation of Village Government in Serumpun Pauh, Kerinci Regency has been running effectively. Village apparatus in carrying out an activity uses planning and supervision that has been implemented properly. So that carrying out an activity will be easy. Supervision and input are also carried out by the village government towards village apparatus in improving services to the community. Meanwhile, the development in Serumpun Pauh, Kerinci Regency, can be said to be successful. With the construction of drainage, footpaths, construction of posyandu, and construction of family latrines that really help the community. Then the utilization of existing human resources in Serumpun Pauh Village by holding training and cadres that aim to develop community creativity.

Keywords: Development, Performance, Village

Abstrak

Pembangunan adalah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan ke arah yang lebih baik. Sedangkan tujuan pembangunan adalah mampu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera baik materiil maupun spiritual. Dalam pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pembangunan desa yang mandiri dapat dihasilkan dari kinerja organisasi pemerintahan yang baik, sehingga akan menghasilkan pembangunan desa yang efektif dan berkualitas. Penelitian ini menganalisis kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Serumpun Pauh Kabupaten Kerinci. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati secara langsung objek yang akan diteliti dengan melakukan kajian mendalam dan analisis terhadap data yang ditemukan di lapangan yang akan dituangkan dalam tulisan deskriptif. Hasil Penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Kinerja Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Serumpun Pauh Kabupaten Kerinci sudah berjalan efektif. Aparatur desa dalam melakukan suatu kegiatan menggunakan perencanaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan baik. Sehingga dalam melakukan suatu kegiatan akan menjadi mudah. Pengawasan dan masukan juga dilakukan oleh pemerintah desa terhadap perangkat desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, pembangunan di Serumpun Pauh, Kabupaten Kerinci, bisa dikatakan berhasil. Dengan adanya pembangunan drainase, jalan setapak, pembangunan posyandu, dan pembangunan jamban keluarga sangat membantu masyarakat. Kemudian pendayagunaan SDM yang ada di Desa Serumpun Pauh dengan mengadakan pelatihan dan kaderisasi yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas masyarakat.

Kata Kunci: Desa, Kinerja, Perkembangan

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja pegawai (*job performance*) atau hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pegawai merupakan sumber daya yang penting bagi organisasi, karena memiliki bakat, tenaga, dan kreativitas yang sangat dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Otonomi dan desentralisasi merupakan pilihan yang menarik, karena menjanjikan terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang efisien. Seorang aparatur pemerintahan dituntut memiliki kemauan dan kesadaran yang tinggi untuk memajukan lembaga dimana bekerja. Upaya untuk memajukan lembaga itu salah satunya dapat diwujudkan melalui kerja keras dan bertanggung jawab dalam setiap tugas yang diamanahkan kepadanya. Pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya dalam asas pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa: pemerintah desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU No. 23 Tahun 2014) tentang Pemerintah Daerah telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui 3 (tiga) jalur, meliputi: Peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, sehingga untuk mengemban misi dimaksud desa memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama, karena masyarakat mulai kritis dalam memonitor dan mengevaluasi pelayanan dari instansi pemerintah.

Di sisi lain, pengukuran keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara obyektif, karena belum diterapkannya sistem pengukuran kinerja, yang Mengingat kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan terendah tersebut, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya. Hal tersebut sangat penting, karena pemerintah desa beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara uama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban diwilayah kekuasaannya. Oleh karena itu peranan mereka demikian penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Penelitian ini akan memfokuskan kajian pada proses penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana desa yang dikenal dengan minimnya kepemilikan sumberdaya manusia yang juga berkorelasi dengan minimnya kinerja masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tentunya hal ini menjadi menarik ketika dikonseptualisasikan pada proses manajemen kinerja pemerintahan desa saat ini, karenanya penelitian ini berusaha mendudukan konsep manajemen sumber daya manusia dan konsep kinerja aparatur desa sebagai sebuah topik yang saling mengisi dalam proses manajemen kinerja pemerintah desa atau boleh dikatakan antara *input* dan *output*. Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud melakukan sebuah penelitian yang berjudul: “Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Serumpun Pauh Kabupaten Kerinci”.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2000:10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Menurut Tulus dalam Suharyanto dan Hadna (2003:13) manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan tenaga kerja dimaksud membantu tujuan

organisasi, individu dan masyarakat. Menurut Hadari Nawawi (2003:42) mengemukakan bahwa MSDM adalah “Proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar potensi fisik dan psikis yang dimiliki berfungsi maksimal bagi tercapainya tujuan organisasi”. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan proses pendayagunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan melalui dengan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia seperti perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, penilaian kinerja pegawai, pelatihan dan pengembangan, promosi, kompensasi dan pemutusan hubungan kerja, sehingga mampu memberikan kontribusi secara efektif dan efisien sesuai dengan harapan usaha perorangan, badan usaha, perusahaan, lembaga, maupun instansi.

Konsep Kinerja

Kinerja berasal dari kata *Job performance* yaitu prestasi kerja yang dicapai seseorang. Performance diterjemahkan menjadi kinerja, juga berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja, penampilan kerja. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Kinerja merupakan penampilan cara-cara untuk menampilkan sesuatu hasil yang diperoleh dengan aktivitas yang dicapai dengan suatu unjuk kerja. Mangkunegara (2010:67). Menurut Rivai dan Sagala (2013:34), menyatakan kinerja pegawai merupakan perilaku nyata yang ditampilkan oleh setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam organisasi. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika. Sedharmayanti (2013:147).

Dari penjelasan teori kinerja dapat disimpulkan kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Serumpun Pauh Kabupaten Kerinci, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:18), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk melaksanakan pembahasan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan dengan teori, konsep-konsep yang ada pada literatur terkait.

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Di Serumpun Pauh Kabupaten Kerinci adapun alasan bersedia memberikan data kepada peneliti. Adanya kecocokan dengan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dengan teori pendukung dalam tinjauan pustaka.

Untuk memudahkan pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi kasus yang bersangkutan yang mana data tersebut dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Sumber data primer ini yaitu berupa wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti secara langsung dilapangan. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang berfungsi sebagai pelengkap. Sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti data, arsip-arsip surat dan dokumen-dokumen yang tersedia.

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan (Sugiyono,2014:300). Burhan Bungin (2012:53), dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (key informan) atau situasi sosial

tertentu yang sarat informasi. Dalam memilih informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan, yakni dengan *purposive sampling*.

Menurut Sugiono (2014:145) untuk memilih informan sebaiknya memenuhi kriteria karakteristik sebagai berikut: (1) Subjek yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses ekulturasi sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati; (2) Subjek yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti; (3) Subjek yang mempunyai waktu memadai untuk diminta informasi; (4) Subjek yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.

Analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengelolaan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh, Adapun Tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:91), sebagai berikut:

(1) Pengumpulan data merupakan kegiatan mengumpulkan data dilapangan baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi data-data tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang telah dipilih; (2) Reduksi data berarti merangkum, kegiatan ini bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat focus, membuang hal-hal yang penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai; (3) Penyajian data dalam penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menemukan uatu makna dari kata-kata yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dan logis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif sehingga bisa lebih mudah dipahami; dan (4) Mengambil kesimpulan merupakan langkah analisis setelah pengolahan data.

Untuk menjaga validitas atau keabsahan data penelitian ini maka akan dilakukan triangulasi baik terhadap data, sumber maupun metode yakni: (1) Triangulasi Sumber, yaitu pengecekan data dan membandingkan fakta dengan sumber lain. Sumber tersebut berupa informasi yang berbeda. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. (2) Triangulasi Data, adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. (3) Triangulasi Metode, adalah dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode lain. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode yaitu wawancara mendalam dan observasi serta menelaah data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas Kinerja Aparatur Desa di Desa

Pada dasarnya Kinerja Aparatur Desa berjalan dengan baik dan peningkatan kinerja cukup signifikan, keberhasilan suatu organisasi itu dapat dilakukan dengan adanya pengembangan sumber daya manusia seperti perbaikan sistem kerja. Kualitas kerja merupakan suatu hasil yang dapat diukur dengan efektifitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran organisasi dengan baik dan berdaya guna. Kinerja aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan harus menggunakan perencanaan kinerja. Perencanaan awal yang dilakukan adalah mulai dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang merupakan rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kemudian ada RKP (Rencana Kegiatan Pembangunan) desa yang sifatnya 1 (satu) tahun berlaku dan semuanya dibentuk dalam peraturan desa. Perencanaan terakhir yang dilakukan adalah MUSREMBANG (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan) yang dilaksanakan setahun sekali yang diikuti oleh pemerintah desa dan tokoh masyarakat serta diketahui oleh pendamping desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Kemudian setelah dilaksanakan musyawarah maka yang menjadi pelaksana adalah pemerintah desa itu sendiri. Tetapi masih kurang evaluasi yang dilakukan pemerintah desa kepada jajarannya”

Wawancara dengan ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengenai kinerja Aparatur Desa mengatakan bahwa: *“Kinerja dari pemerintah desa dan jajarannya selalu mengutamakan kekompakan dan kerjasama karena kegiatan tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama. Kekompakan dan kerjasama yang dimaksud adalah saling membantu dalam berbagai hal. Perencanaan awal dimulai dari aspirasi warga melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) kemudian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa sampai dengan pengawasan kegiatan. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan wadah atau tempat menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui MUSREMBANG (Musyawarah*

Perencanaan Dan Pembangunan). Jadi untuk realisasinya nanti pemerintah desa dan jajarannya yang melakukan, kemudian sebagai BPD (Badan Permusyawaratan Desa) selalu mengawasi kinerja pemerintah desa itu sendiri, apakah di dalam pengelolaan dana yang ada pemerintah desa bisa melaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan di MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan) Kemudian pelaksanaan kinerja yang ada di Desa Serumpun Pauh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) juga bekerjasama dengan pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan desa”.

Wawancara dengan Kepala Desa mengenai manajemen kinerja mengatakan bahwa: *“Kinerja aparatur Desa di Desa Serumpun Pauh, selalu mengutamakan perencanaan dalam setiap kegiatan, baik dari kegiatan pembangunan maupun kegiatan yang diadakan di dalam kantor. Kemudian sebagai pemerintah Desa harus memberikan masukan dan pengawasan kepada staf, kepala urusan dan kepala seksi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”.*

Wawancara di atas didukung oleh pendapat Aparatur Desa menyatakan: *“Kinerja Aparatur Desa yang ada di Desa Serumpun Pauh masing-masing mempunyai tupoksinya jadi mereka memiliki pekerjaan yang sesuai dengan fungsi masing-masing.”*

Hasil wawancara dengan bendahara desa mengatakan: *“Hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.*

Hasil wawancara Aparatur Desa menyatakan: *“Proses kerja merupakan suatu tahapan terpenting dimana pegawai menjalankan tugas dan perannya dalam suatu organisasi, melalui proses kerja ini kinerja pegawai dapat dilihat dari kemampuan membuat perencanaan kerja, kreatif dalam melaksanakan pekerjaan, mengevaluasi tindakan kerja, melakukan tindakan perbaikan”.*

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh informan tersebut, penulis menyimpulkan kualitas pelaksanaan kerja aparatur desa sudah terlaksana sesuai dengan program kerja dapat kita lihat dari MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan) dan hasil dari MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan) akan dijalankan oleh pemerintah desa dan jajarannya yang dipantau oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). kinerja Aparatur Desa yang ada di Desa Serumpun Pauh perlu yang namanya evaluasi dalam setiap kegiatan.

Kuantitas

Kuantitas pekerjaan ini berhubungan dengan jumlah/volume tugas (pekerjaan) yang diselesaikan pada waktu yang ditentukan. Kuantitas pekerjaan dapat diperoleh dari hasil pengukuran kerja atau penetapan tujuan partisipatif. Dalam menentukan kualitas pekerjaan yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi baik jumlah pegawai maupun pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan penilaian kualitas. Menurut Ibu Kader Posyandu Serumpun Pauh menyatakan: *“Pegawai dan Aparatur Desa mempunyai kemampuan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan kuantitas yang baik, sehingga para pegawai senantiasa berusaha memberikan hasil kerja yang baik”.*

Hal yang senada disampaikan Aparatur Desa menyatakan: *“Setiap pegawai atau aparatur desa telah memahami tugasnya masing-masing karena setiap pegawai sudah memiliki tugas masing-masing, dan dengan adanya hal yang seperti itu maka diharapkan para pegawai dengan mudah menyelesaikan setiap pekerjaan mereka tepat pada waktunya sehingga pekerjaan yang lain tidak saling berbenturan akibat penyelesaian tugas yang terlambat”.*

Disampaikan pula bendahara Desa mengatakan: *“Pegawai atau Aparatur Desa telah memahami tugasnya masing-masing”.*

Hasil wawancara BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menyatakan:

“Pegawai atau Aparatur Desa sudah bekerja maksimal mungkin”.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Serumpun Pauh:

“Kuantitas pekerjaan merupakan seberapa besarnya beban kerja atau sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seorang pegawai. Pekerjaan diukur dari kemampuan secara kuantitatif di dalam mencapai target atau hasil kerja atas pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan”.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Aparatur Desa sudah cukup serius dalam melaksanakan pekerja sehingga hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan berusaha untuk menyelesaikannya tepat pada waktunya karena setiap pegawai/Individu sudah memiliki job description yang didalamnya berisi mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban para pegawai terhadap tugas dan fungsi yang harus mereka kerjakan walaupun masih ada beberapa pegawai yang kurang serius dalam menyelesaikan tugasnya. Untuk itu perlu ditingkatkan disiplin pegawai dalam hal menyelesaikan pekerjaannya tepat pada waktunya bahkan sebelum dibutuhkannya pekerjaan tersebut sehingga bisa mencapai target kerja organisasi yang telah ditetapkan.

Ketepatan Waktu

Ketepatan Waktu yaitu tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada waktu yang diinginkan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain serta dapat melaksanakan tugas dengan cepat, tepat sesuai dengan aturan dan standar yang ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan ketepatan waktu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengatakan:

“Kinerja atau performa organisasi merupakan hasil kerja organisasi dari serangkaian aktivitas yang dijalankan organisasi, wujud dari aktivitas organisasi bahwa Aparatur Desa dalam menjalankan tugas.”

Hal yang senada disampaikan Ibu Kader Posyandu mengatakan:

“Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Hasil wawancara dengan Aparatur Desa menyatakan:

“Ketepatan waktu dan kesesuaian rencana kegiatan / rencana kerja dengan hasil pekerjaan atau ketelitian hasil pekerjaan”.

Hal yang senada disampaikan Aparatur Desa menyatakan:

“Ketepatan waktu kerja pegawai adalah penggunaan waktu kerja dengan efektif dan efisien dalam melaksanakan pekerjaan, dengan kata lain kesesuaian penyelesaian pekerjaan dengan waktu yang telah ditentukan tepat pada waktunya.”

Hasil wawancara dengan Aparatur Desa mengatakan:

“Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka setiap pekerjaan dilaksanakan dengan tepat waktu”.

Berdasarkan pendapat di atas hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Aparatur Desa Ketepatan waktu dalam melaksanakan tugas dan kesesuaian rencana kegiatan/rencana kerja dengan hasil pekerjaan atau ketelitian hasil pekerjaan. Di samping itu rasa tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugasnya juga mempengaruhi kinerja organisasi yang mana jika disetiap pegawai memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya maka memberikan hasil yang memuaskan.

Penggunaan Sumber daya

Pembangunan desa merupakan pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifal lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa dan karakteristik kawasan pemukiman. Kemudian pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik karena adanya dukungan dari dana desa.

APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) adalah peraturan Desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Wawancara dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengenai pembangunan desa mengatakan bahwa: *“Pembangunan infrastruktur yang telah terealisasi yaitu: pembuatan jalan usaha tani di beberapa lokasi, pembangunan posyandu, pembuatan drainase, dan pembangunan jamban keluarga sebanyak 4 unit yang diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Kemudian pemanfaatan sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan jahit menjahit, kerajinan tangan seperti pembuatan tas, pelatihan Las, pelatihan administrasi PKK, pelatihan dasa wisma dan pelatihan kader sandang pangan yang bertujuan agar sumber daya manusia yang ada di Desa Serumpun Pauh dapat berkembang. Kemudian ada yang namanya RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang di dalamnya terangkum semua pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan. Adapun musyawarah dusun yang bertujuan untuk menggali aspirasi apa-apa saja yang akan dilakukan untuk pembangunan di dusunnya. Kemudian pada saat MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan) dilaksanakan, setiap dusun mengemukakan pendapat untuk dusunnya yang perlu dibenahi. Setelah ada pelaksanaan MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan) ada namanya RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Dan Bumdes, (Anggaran Pendapatan Belanja Desa). Jadi dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) di ramu yang mana termasuk prioritas utama itu yang diutamakan dibiayai berdasarkan anggaran yang diperoleh dari Kabupaten. Tetapi anggaran itu tidak monoton untuk pembangunan saja karena ada tunjangan untuk BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan gaji pemerintah desa dan jajarannya. Semua telah dirangkum dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Desa)”*.

Adapun hasil wawancara Kepala Desa mengenai pembangunan mengatakan bahwa: *“masalah pembangunan dari dusun sampai ke tingkat RT RW berjalan sebagaimana yang kita rencanakan bersama karena dengan turunnya dana desa di semua desa maka bukan lagi pemerintah yang membangun desa tetapi desa yang membangun dirinya sendiri tinggal bagaimana pemerintah selaku tokoh masyarakat, aparat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bersamasama merencanakan apa yang menjadi prioritas yang harus didahulukan untuk dikerjakan. Contoh pembangunan di Desa Serumpun Pauh adalah sudah banyak jalan usaha tani dan drainase yang telah dikerjakan.”*

Hasil wawancara dengan Aparatur Desa mengatakan bahwa: *“Pembangunan Desa dituangkan ke dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa. Rencana pembangunan masyarakat Desa berlaku 6 tahun jadi kita tidak bisa bekerja kalau yang tidak tercakup di dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) turunannya dari RKP (Rencana Kegiatan Pembangunan) Desa sifatnya 1 (Satu) tahun berlakunya dan semuanya dibentuk dalam perdes (Peraturan Desa). Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.”*

Wawancara dengan Aparatur Desa mengatakan bahwa:

“Pertama dilakukan adalah perencanaan pembangunan desa. Ada beberapa tempat di Desa yang diadakan pembangunan misalnya drainase, jalan usaha tani dan sebagainya jadi pembangunan di Desa Serumpun Pauh cukup berkembang”.

Wawancara dengan Aparatur Desa mengenai pembangunan desa mengatakan bahwa: *“Pembangunan di Desa Serumpun Pauh yang saya amati selalu mengutamakan hal-hal yang penting yang dibutuhkan dan lebih bermanfaat bagi warga setempat itu yang selalu diutamakan untuk dibangun misalkan pembangunan jalan usaha tani, renase dan sebagainya. Adapun kendala yang biasa terjadi adalah pembebasan lahan, terkadang ada warga yang ingin jalannya bagus tetapi tidak mau mengibahkan lahannya untuk dijadikan jalan”*.

Dari pembahasan di atas dapat dibuktikan bahwa dalam mewujudkan pembangunan di Desa Serumpun Pauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci yaitu dengan melaksanakan kerja sama antara pemerintah desa sampai jajaran terendah dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Mengenai pembangunan di Desa

Serumpun Pauh sudah berjalan dengan baik yang ditandai dengan terlaksananya program kerja pembangunan desa dengan baik. Kemudian pembangunan pada bidang infrastruktur yaitu: pembuatan jalan usaha tani di beberapa lokasi, pembangunan posyandu, pembuatan drainase, dan pembangunan jamban keluarga sebanyak 4 unit yang diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Kemudian pemanfaatan sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan jahit menjahit, kerajinan tangan seperti pembuatan tas, Pelatihan Las, pelatihan administrasi PKK, pelatihan dasa wisma dan pelatihan kader sandang pangan yang bertujuan agar sumber daya manusia yang ada di Desa Serumpun Pauh dapat maju.

Kepribadian Diri

Kepribadian Diri Aparatur Desa dalam bertindak maupun dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan desa, pengukuran dengan menggunakan persepsi pegawai dalam membina hubungan dengan organisasi dan tanggung jawab, loyalitas terhadap organisasi. Aparatur Desa Menghormati aturan-aturan organisasi dimana dengan dia bekerja dapat mendorong seorang pegawai untuk bekerja lebih prima karena dengan kedisiplinan pegawai yang tercipta dengan sendirinya maka pegawai tersebut akan betah bekerja dalam organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara Kader Posyandu Serumpun Pauh menyatakan *“Pegawai dan Aparatur Desa mempunyai kemampuan menyelesaikan pekerjaan dan mempunyai kepribadian yang baik selalu kompak dalam pelaksanaan pekerjaan”*.

Hal yang senada disampaikan Aparatur Desa menyatakan :

“Setiap pegawai atau aparatur desa telah memahami tugasnya masing-masing saling membantu sama lainnya”.

Begitu pula dengan bendahara Desa mengatakan:

“Aparatur Desa sudah berperilaku yang baik”.

Hasil wawancara dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menyatakan:

“Kepala Desa yang menjalankan pemerintahan di desa berjalan atau tidaknya roda pemerinthan di desa Serumpun Pauh tergantung dari kerja sama dan manajemen kepemimpinan itu sendiri. Jadi peran aktif kepala desa dan dibantu dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan harus benar di laksanakan dengan baik demi tercapainya efesensi dan efektifitas pemerintahan desa”.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Serumpun Pauh:

“Aparatur Desa, adanya kecintaan dan kesetiaan, penyatuan dengan tujuan dan nilai-nilai dalam organisasi, keinginan untuk tetap berada dalam organisasi, dan kesediaan untuk bekerja keras atas nama organisasi”.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan atau pelaksanaan pekerjaan Aparatur Desa yang berkaitan dengan keinginan kuat seorang Aparatur Desa untuk mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi, serta mendukung dan menjalankan tujuan organisasi atau organisasi secara penuh suka rela, serta komitmen kerja lebih dari sekedar kesetiaan, ikatan batin anggota terhadap organisasinya.

SIMPULAN

Kualitas kinerja aparatur desa yang ada di Desa Serumpun Pauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci sudah berjalan dengan baik yang dimulai dari sebuah perencanaan yang baik, yang melibatkan semua warga desa untuk mengemukakan aspirasinya melalui BPD (Badan permusyawaratan Desa) pada kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan). Setelah hasil Musrenbang rampung kemudian pemerintah desa serta jajarannya yang melaksanakan program kerja dalam pengawasan BPD. Meskipun dalam hal evaluasi kinerja belum terlaksana dengan baik, yang disebabkan oleh pemerintah desa yang kurang mengevaluasi kinerja bawahannya. Aparatur Desa sudah cukup serius dalam melaksanakan pekerja sehingga hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan berusaha untuk menyelesaikannya tepat pada waktunya karena setiap pegawai/Individu sudah memiliki job description yang didalamnya berisi mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban para pegawai terhadap tugas dan fungsi yang harus mereka kerjakan walaupun masih ada beberapa pegawai yang kurang serius dalam menyelesaikan tugasnya. Untuk itu perlu

ditingkatkan disiplin pegawai dalam hal menyelesaikan pekerjaannya tepat pada waktunya bahkan sebelum dibutuhkannya pekerjaan tersebut sehingga bisa mencapai target kerja organisasi yang telah ditetapkan.

Ketepatan waktu dalam melaksanakan tugas dan kesesuaian rencana kegiatan/rencana kerja dengan hasil pekerjaan atau ketelitian hasil pekerjaan. Disamping itu rasa tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugasnya juga mempengaruhi kinerja organisasi. Yang mana jika disetiap pegawai memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya maka memberikan hasil yang memuaskan. Pembangunan di Desa Serumpun Pauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci yaitu dengan melaksanakan kerja sama antara pemerintah desa sampai jajaran terendah dan BPD. Mengenai pembangunan di Desa Serumpun Pauh sudah berjalan dengan baik yang ditandai dengan terlaksananya program kerja pembangunan desa dengan baik. Pembangunan di Desa Serumpun Pauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci dalam program kerja pembangunan desa sudah berjalan dengan baik serta kerjasama antara BPD. Pembangunan Desa meliputi masalah infrastruktur yaitu: Pembuatan jalan usaha tani di beberapa lokasi, pembangunan posyandu, pekerjaan pembuatan drainase, dan pembangunan jamban keluarga sebanyak 4 unit yang diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Kemudian pemanfaatan sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan jahit menjahit, kerajinan tangan seperti pembuatan tas, pelatihan Las, pelatihan administrasin pkk, pelatihan dasa wisma dan pelatihan kader sandang pangan yang bertujuan agar sumber daya manusia yang ada di Desa Serumpun Pauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci dapat maju.

Implementasi dari penelitian ini bahwa kualitas layanan dari aparat pemerintah Desa Serumpun Pauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci dalam memberikan pelayanan, dilihat dari aspek kesederhanaan, kecakapan dan kehandalan petugas, keramahan, dan ekonomis sudah cukup baik, akan tetapi jika dilihat dari aspek kejelasan dan kepastian pelayanan belum cukup baik, hal ini dikarenakan belum ada kejelasan dan kepastian pelayanan mengenai waktu selesai dari proses pengurusan surat-surat keterangan yang diurus oleh masyarakat. Dari segi kualitas layanan kiranya pemerintah desa bisa lebih meningkatkan lagi aspek kesederhanaan, kecakapan dan kehandalan petugas, keramahan, dan ekonomis, agar tatacara pelayanan bisa lebih mudah, lancar, tepat, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami oleh masyarakat, dan untuk aspek kejelasan dan kepastian waktu agar bisa lebih diperhatikan lagi untuk hasil kerja yang lebih baik dan sesuai dengan apa yang di inginkan masyarakat. Pertanggungjawaban etika pelayanan pemerintah Desa Serumpun Pauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci perlu ditingkatkan lagi, dalam hal transparansi pelayanan kepada masyarakat, prinsip keadilan yang perlu disamaratakan, serta jaminan penegakan hukum, hak asasi manusia, dan orientasi pelayanan yang perlu dikembangkan lagi terhadap seluruh masyarakat. Aparatur Desa meningkatkan pekerja sehingga hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan berusaha untuk menyelesaikannya tepat pada waktunya. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga pemerintahan desa dapat berjalاندengan baik. Sehingga inovasi pembangunan serta efektifitas dan efisensi pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta.
- As'ad, 2011. *Seri Ilmu Sumber Daya Manusia: Psikologi Industri*. Edisi IV. Yogyakarta: Liberty
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Dwiyanto, AB, 2004. *Tata Pemerintahan*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Djohermansyah Djohan, 2003. *Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta: Yasrif Watampone.
- Gibson, Peter, 2010. *Teori-teori Birokrasi*. Penerbit Rajawali Press, Jakarta.
- Gant dalam Suryono, 2001, *Teori dan Isu Pembangunan*. Universitas Malang Press, Malang.
- Jaitun. 2013. *Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung*. ISSN 0000-0000.
- Mangkunegara, 2008. *Organisasi Pemerintahan dan Management*, Penerbit Alumni, Bandung.

- Ndraha, Taliziduhu, 2005. *Kybernology*. Ilmu Pemerintahan Baru. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemerintah Desa
- Prabu, Anwar. 2014. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Refika Aditama
- Saputra, H. A. 2016. *Kinerja Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Teras Baru Kecamatan Tajung Palas Kabupaten Bulungan*. ISSN: 2337-8670.
- Siagian, S.P. 2008. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Haji Masagung
- Sugiyono. 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sedarmayanti. 2012. *Good governance “kepemerintahan yang baik”*. Bandung: Maju Mundur
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2007. *Manajemen Publik*, Edisi ke 2.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Undang - Undang No. 6, Tahun 2014, Tentang Desa Pasal 1 tentang Desa. 2014. Dana Desa. Bandung: Citra Bandung.